



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 2 Februari 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021; 2. Membahas Program Kerja; 3. Dan Lain-lain
Ketua Rapat	: Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	: Kunarto, S.Sos
Hadir Anggota	: Orang Anggota dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR pada hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021, Membahas Program Kerja, dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan Sekjen, Irjen, dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan BPSDM Kementerian PUPR dalam APBN TA 2021:
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021 sebagai berikut:

Unit Organisasi Eselon I	Realisasi Keuangan TA 2021	Realisasi Fisik TA 2021
Sekretariat Jenderal	96,6%	100%
Inspektorat Jenderal	87,9%	98,07%
BPSDM	94,27%	100%

- b. Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan BPSDM agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan, sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022.
2. Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada Sekretariat Jenderal untuk segera menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksana UU No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
3. Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) melalui penyusunan SOP dan peraturan tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
4. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan BPSDM untuk:
 - a. Meningkatkan koordinasi internal dengan setiap Unit Organisasi Eselon I;
 - b. Meningkatkan fungsi pengendalian intern untuk meminimalisir temuan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen aset di Kementerian PUPR;

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 2 Februari 2022

KETUA RAPAT,



RIDWAN BAE

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR,



T. ISKANDAR

KEPALA BPSDM
KEMENTERIAN PUPR,



KHALAWI ABDUL HAMID

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR,



MOHAMMAD ZAINAL FATAH